

PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH

2024

PERDAPROV NTT NO. 1, LD 2024/NO.001 TLD NO.0131

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- Abstrak :
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2022 , UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 34 Tahun 2021 dan PP No. 35 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis pajak yang diatur dalam Perda ini meliputi : Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur yaitu : PKB; BBNKB; PAB, PAP dan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak yaitu : PBBKB; Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Jenis retribusi meliputi : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pemungutan Pajak dan Retribusi Dalam Rangka mendukung kemudahan Berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya. Diatur tentang Kerahasiaan data wajib pajak, Insentif pemungutan, Penyidikan dan Ketentuan Pidana.
- Catatan
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2024
 - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tidak berlaku.
 - Penjelasan : 8 hlm